

## PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN PERBATASAN DI PROVINSI RIAU.

Pazli<sup>1</sup>

Universitas Riau, Email: pazliku @ gmail.com

### Abstrak.

Penelitian ini berdasarkan pada (1) Fenomena dua azas revolusioner dari UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu azas Subsidiaritas dan Rekognisi. Secara dominan aspek ini menjadi landasan penelitian ini tentu merupakan antisipasi terhadap berpenetrasi, tumbuh dan berkembangnya capital pada wilayah perdesaan terutama pada wilayah 3T. Dengan semangat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa ini mengindikasikan bahwa keunggulan dan potensi suatu wilayah di perdesaan perbatasan memerlukan kebijakan perencanaan yang tepat dan berkeadilan dalam mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakatnya. "Bagaimana Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Perbatasan Di Provinsi Riau menghadapi konsekuensi implikasi MEA sebagai wilayah kesatuan pasar dan basis produksi di wilayah terdepan dan hinterland di Provinsi Riau?". Selanjutnya bagaimana kebijakan yang akan dibangun kebijakan yang diperlukan untuk Penguatan Ekonomi Masyarakat perdesaan pada wilayah perbatasan 3T tersebut?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis Location Quotient (LQ) merupakan alat analisis yang digunakan para ahli ekonomi regional untuk memperkirakan kegiatan basis dan non basis dari sektor ekonomi (Fadali and Thomas, 2006). Temuan penelitian, sektor unggulan diperbatasan adalah sector pertanian dalam pengertian luas; sector perdagangan dan sector industri pengolahan. olahan sagu, kelapa bulat dan kopra, pinang , arang dan kue semprong. Sedangkan komoditas unggulan Sawit, kelapa, pinang dan produk tenunan ( kain songket dan lainnya); Kebijakan khusus pencadangan dan perbaikan lahan; penyediaan modal usaha; peningkatan sarana dan prasana (infrastruktur); kemudahan perizinan usaha pangan ; peningkatan teknologi produksi, pemerintahan Meranti dan kabupaten belakangnya merumuskan MOU dan kerjasama antara .

**Kata Kunci:** Perencanaan Wilayah, Pembangunan Perdesaan Perbatasan.

## PENDAHULUAN

Wilayah Perdesaan di perbatasan termasuk ke dalam wilayah terpengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan keinginan ASEAN sebagai organisasi negara-negara di Asia Tenggara untuk mewujudkan kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan dalam percaturan perekonomian internasional, yang efektif diberlakukan 31 Desember 2015. MEA memiliki 4 pilar penting yaitu: Pertama: wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kedua, MEA sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan

<sup>1</sup>Dosen Universitas Riau dan Program Studi Pasca Sarjana S2- Universitas Riau.



suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights* (IPR), *taxation*, dan *E-Commerce*. Ketiga, MEA sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Sebagaimana menurut Shin (2005) menjelaskan fenomena integrasi ekonomi, seperti MEA, memiliki 2 dimensi utama yakni *mobile factors* dan *non-mobile factors*. Dimensi pertama terfokus pada pilar investasi. Kemudahan teknologi dan integrasi perbankan membuat modal dengan cepat berpindah. Sementara itu, pada dimensi kedua, kualitas *non-mobile factors* seperti respon sektor publik terhadap tantangan perbaikan pelayanan, percepatan infrastruktur dan harmonisasi regulasi menjadi hal krusial yang menentukan kemana *mobile factors* tadi berpindah.

Penelitian ini berdasarkan pada (1) Inpres No 6 tahun 2014 tentang peningkatan daya saing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN; (2) fenomena dua azas revolusioner dari UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu azas Subsidiaritas dan Rekognisi. Dengan semangat ini mengindikasikan bahwa keunggulan dan potensi suatu wilayah memerlukan kebijakan yang tepat dan berkeadilan untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonominya masyarakatnya. (3) Kepastian kehadiran masyarakat ekonomi ASEAN terutama pada komoditas yang berpenetrasi, tumbuh dan berkembang pada wilayah perdesaan terutama pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Berdasarkan garis besar pokok pemikiran diatas penulis melakukan penelitian dengan permasalahan utama adalah "Bagaimana Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Perbatasan Di Provinsi Riau menghadapi konsekuensi implikasi MEA sebagai wilayah kesatuan pasar dan basis produksi di wilayah terdepan dan *hinterland* di Provinsi Riau?". Selanjutnya bagaimana konstruksi kebijakan yang akan dibangun kebijakan yang diperlukan untuk Penguatan Ekonomi Masyarakat perdesaan pada wilayah perbatasan 3T tersebut?. Berangkat dari permasalahan tersebut diatas penulis ingin secara komprehensif menuntaskan dalam sebuah judul Penelitian: Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Perbatasan Di Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## 2. Konsep Pengembangan Wilayah serta Kebijakan Pemerintah.

Menurut Losch, pusat-pusat wilayah pasar dibagi menjadi sector “kota kaya” (*city rich*) dan “kota miskin” (*city poor*). Sektor kota kaya mempunyai karakteristik

- 1) Jaringan market area yang luas
- 2) Aktifitasnya banyak sehingga order lebih tinggi.

Sedangkan, untuk kota miskin memiliki karakteristik;

- 1) Jaringan market area yang sempit;
- 2) Aktifitasnya sedikit sehingga order lebih rendah.

Losch mengemukakan bagaimana economic landscape terjadi, yang merupakan keseimbangan (*equilibrium*) antara supply dan demand. Oleh karena itu Losch merupakan pendahulu dalam mengatur kegiatan ekonomi secara spasial dan pelopor dalam teori ekonomi regional modern.

Wilayah homogen adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan keseragaman atau seperangkat ciri atau karakteristik tertentu dari aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan beserta kombinasi dan turunannya. Wilayah homogeny dibatasi oleh keseragaman secara internal (*internal uniformity*). Sifat dan ciri homogenitas dalam hal ekonomi seperti struktur produksi dan konsumsi yang homogen dan tingkat pendapatan yang homogen. Dalam hal geografi yaitu wilayah yang mempunyai topografi dan iklim yang sama.

Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional memiliki sifat saling ketergantungan antara pusat (*inti*) dan daerah dibelakangnya (*hinterland*). Ketergantungan antara pusat dan daerah dapat dilihat dari faktor produksi, penduduk, barang dan jasa, komunikasi, transportasi serta perhubungan di antara keduanya. Wilayah nodal digunakan dalam analisis mengenai ekonomi wilayah (ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi).

Batas wilayah nodal didasarkan pada pengaruh suatu pusat kegiatan ekonomi jika digantikan oleh pusat kegiatan ekonomi lainnya. Struktur dari wilayah nodal dapat digambarkan berupa suatu sel hidup dengan adanya inti dan plasma yang saling melengkapi. Intergrasi fungsional merupakan dasar hubungan ketergantungan atas dasar kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

Wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Wilayah perencanaan mengalami perubahan-perubahan penting dalam pengembangannya dan memungkinkan persoalan-persoalan perencanaan sebagai suatu kesatuan. Wilayah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

perencanaan memiliki ciri-ciri yaitu masyarakat mempunyai kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapi daerah, memiliki kemampuan untuk merubah industri yang dilaksanakan sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia, menggunakan salah satu model perencanaan, dan memiliki pusat pertumbuhan.

Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Wilayah dalam pengertian administratif sering disebut juga daerah. Wilayah administrasi berupa propinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan wilayah administrasi disebabkan oleh dua faktor, yakni berdasarkan satuan administrasi dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah, dan wilayah didasarkan pada satuan administrasi pemerintahan untuk mempermudah dianalisis dalam pengumpulan data di berbagai bagian wilayah.

Di suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, dimana industri dikelompokkan ditempat itu, karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk penghematan-penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan investasi, lapangan kerja dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan dari pada daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (urbanisasi) akan dapat mengabsorbsikan tenaga kerja yang trampil dan pihak lain akan mengurangi pengangguran tidak kentara di daerah belakang.

Jika komplementaritas kuat akan terjadi proses penyebaran pembangunan di daerah-daerah belakang (trikling down) dan sebaliknya jika komplementaritas lemah akan terjadi pengaruh polarisasi (Keban, 1995). Jika pengeruh polarisasi lebih kuat dari pengeruh penyebaran pembangunan maka akan timbul masyarakat dualistik, yaitu selain memiliki ciri-ciri daerah perkotaan modern juga memiliki daerah perdesaan terbelakang (Hammand, 1985, Indra Catri, 1993).

Pesimisme tersebut dapat dimaklumi karena Myrdal tidak memaklumi bahwa timbulnya titik pertumbuhan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan merupakan syarat bagi perkembangan selanjutnya dimana-mana. Pusat pemikiran Myrdal pada dasarnya komulatif menyebabkan ia tidak dapat melihat dengan titik balik apabila





perkembangan kearah polarisasi di suatu wilayah sudah berlangsung untuk beberapa waktu. Kausasi sirkuler kumulatif selalu meghasilkan penyebaran pembangunan yang lemah dan tidak pemerataan, atau dapat dikatakan bahwa mobilitas akan memperbesar ketimpangan pendapatan dan migrasi akan memperbesar ketimpangan regional.

Myrdal menekankan pada langkah-langkah kebijaksanaan untuk melemahkan backwash effects dan meperkuat sread effectc agar proses kausasi sirkuler kumulatif mengarah keatas, dengan demikian semakin memperkecil ketimpangan regional (Murtomo, 1988, Indra Catri, 1993, Keban, 1995). Gunnar Myrdal (1957) dan Aschman (1958) dalam Keban (1995), menyerang pengertian equilibrium dalam teori ekonomi dan mengemukakan ide-ide dasar tentang polarisasi pembangunan.

Pembangunan wilayah dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinyu tetapi kumulatif yang berasal pada sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang terletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi interaksi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung menyebar ke bawah dan keluar dari pusat-pusat tersebut ke daerah-daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah (Hansen, 1972).

Proses daerah-daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya terhadap daerah-daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh-pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah inti. Terdiri dari pengaruh dominasi (melemahnya perekonomian di daerah-daerah pinggiran sebagai akibat dari mengalirnya sumberdaya-sumberdaya alam, manusia dan modal ke wilayah inti), pengaruh informasi (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan inovatif), pengaruh psikologis (penciptaan kondisi yang menggairahkan untuk melanjutkan kegiatan kegiatan inovatif secara lebih nyata), pengaruh antar rantai kecenderungan inovasi-inovasi untuk menghasilkan inovasi lainnya), dan pengaruh produksi menciptakan struktur balas jasa yang menarik untuk kegiatan kegiatan inovatif (Hasen, 1972).

Sehubungan dengan peranan daerah inti dalam pembangunan spasial, Friedmann dalam Hasen (1972); mengemukakan lima buah preposisi utama, yaitu: 1) Daerah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah disekitarnya melalui sistem suplai, pasar, dan daerah administrasi; 2) Daerah inti meneruskan secara sistematis dorongan-dorongan inovasi ke daerah-daerah di

sekitarnya yang terletak dalam wilayah pengaruhnya; 3) Sampai pada suatu titik tertentu pertumbuhan daerah inti cenderung mempunyai pengaruh positif dalam proses pembangunan sistem spasial, akan tetapi mungkin pula mempunyai pengaruh negatif jika penyebaran pembangunan wilayah inti kepada daerah-daerah di sekitarnya tidak berhasil ditingkatkan, sehingga keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah di sekitarnya terhadap daerah inti menjadi berkurang; 4) Dalam suatu sistem spasial, hirarki daerah-daerah inti ditetapkan berdasarkan kedudukan fungsionalnya masing-masing meliputi karakteristik-karakteristiknya secara terperinci dan prestasinya; 5) Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah sistem spasial dengan cara mengembangkan pertukaran informasi.

Meskipun hubungan daerah inti-daerah pinggiran sebagai kerangka dasar kebijakan dan perencanaan pembangunan regional dianggap kasar dan sederhana, akan tetapi dapat digunakan untuk menjelaskan keterhubungan dan ketergantungan antara pusat dan daerah-daerah sekitarnya. Kemudian Friedman mengembangkan klasifikasi daerah inti dan daerah-daerah pinggiran menjadi daerah metropolitan (*metropolitan region*), poros pembangunan (*development axes*), daerah perbatasan (*frontier region*) dan daerah tertekan (*depressed region*).

Wilayah perbatasan termasuk dalam kategori daerah pinggiran dan di dalamnya terdapat pusat-pusat kecil yang mempunyai potensi berkembang menjadi pusat-pusat yang lebih besar pada masa depan. Beberapa arah perkembangannya yang penting dapat dikemukakan, yaitu hiper urbanisasi, pembangunan modern yang terpusat di beberapa kota saja, sedangkan daerah-daerah di luarnya boleh dikatakan terpencil dari perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, pengangguran dan kerja di bawah daya (*under employment*), perbedaan pendapatan dan kemiskinan, kekurangan makanan yang terus menerus, hidup kebendaan penduduk daerah pertanian tambah buruk, dan ketergantungan pada dunia luar (Friedman dan Douglass, 1976).

Friedman menganjurkan pembentukan agropolis-agropolis atau kota-kota di ladang. Hal ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota-kota besar, tetapi mendorong mereka untuk tetap tinggal di tempat mereka semula. Dengan pembangunan agropolitan distrik, pertentangan abadi antara kota dan desa dapat diredakan terutama di negara-negara berkembang, (Friedman dan Douglass, 1976).



Menurut Makmur dan Ahmadi (2016) Pemerintah membuat sejumlah kebijakan strategis dan teknis terkait dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kebijakan tersebut, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral. Kebijakan strategis lintas sektoral antara lain penerbitan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), kebijakan Hilirisasi sektor industri nasional, kebijakan ketahanan pangan, Sistem Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, mendirikan ASEAN Center serta Pusat Studi ASEAN di beberapa universitas dan sebagainya.

### 3. Komoditas Unggulan di Perdesaan Perbatasan

Komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti cukup banyak. Komoditas-komoditas tersebut ada yang dihasilkan oleh perusahaan dan pabrik yang cukup besar, tetapi ada juga yang dihasilkan oleh sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Banyak sekali jenis industri terutama sektor UKM yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Para pelaku usaha ini mampu menggerakkan roda ekonomi daerah dan sekaligus membuka lapangan kerja kepada masyarakat. Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti, maka diketahui terdapat sekitar 955 unit pelaku usaha di berbagai bidang yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada pada tahun 2011. Usaha Kecil Menengah (UKM) sejumlah ini, saling tidak menyerap tenaga kerja sebanyak 1.354 orang.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi besar investasi pada tahun 2011, sektor pengolahan sagu merupakan yang tertinggi nilai investasinya yang mencapai lebih dari Rp 8 Milyar, kemudian diikuti oleh pengolahan arang dan kopra. Hal ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan sagu, pengolahan arang dan kopra merupakan industri yang sangat penting artinya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat beberapa kelompok jenis komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kaitan dengan adanya MEA.

### 3.1. Industri Sagu

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki jenis tanah gambut. Jenis tanah ini sangat cocok dengan tanaman sagu, sehingga menyebabkan sagu Meranti menjadi sagu yang terbaik. Kebanyakan pengolahan sagu masih memproduksi hingga



berbentuk tepung sagu untuk kemudian dijual keluar daerah atau ekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi produk akhir atau menjadi campuran untuk suatu produk tertentu. Bentuk pengolahan produk akhir sagu masih bersifat tradisional seperti mie sagu, suhun dan kue-kue berbahan dasar sagu. Produk Industri komoditi sagu asal Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya dipasarkan di Pulau Jawa dan Negara tetangga Malaysia. Ekspor industri sagu Kepulauan Meranti juga menembus pasar negara lainnya di belahan Asia Timur dan Asia Barat.

#### b. Industri Arang

Industri arang (panglong arang) terdapat hampir merata di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Kepulauan Meranti. Produksi arang yang dihasilkan diperkirakan juga berimbang antara kecamatan. Dari sisi kapabilitas (kemampuan mengelola sumber daya dalam menghasilkan *output* dengan nilai *input* yang relatif sama), Kecamatan Tebing Tinggi Barat menjadi yang paling efisien dalam produksi arang, sebab meskipun sama-sama memiliki jumlah panglong yang sama dengan Kecamatan Merbau dan Kecamatan Pulau Merbau, kenyataannya panglong di Kecamatan Tebing Tinggi Barat bisa menghasilkan lebih banyak produksi arang.

#### c. Kelapa dan Industri Pengolahannya

Tanaman perkebunan kelapa di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terentral di Pulau Rangsang atau di Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Timur. Pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan berupaya untuk memanfaatkan lahan perkarang untuk meningkatkan luas tanaman kelapa tersebut.

Produksi olahan kelapa Kabupaten Kepulauan Meraanti dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terlihat agak berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2010 jumlah produksinya sebesar 21705 matriks dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 27349.

Industri olahan kelapa sebagian besar dalam bentuk komoditas kopra, dan industri ini memiliki kelayakan finansial. Hasil penghitungan kelayakan usaha oleh emda Meranti mengindikasikan industri kopra ini mempunyai kelayakan yang tinggi. Nilai NPV nya sebesar Rp.94.471.545 dalam periode 20 tahun masa investasi. Dengan nilai yang positif dan sangat besar ini maka industri kopra sangat layak untuk





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dilakukan di kembangkan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Begitu juga dengan nilai IRR nya sebesar 147 persen dalam masa 20 tahun jauh lebih tinggi dibanding dengan bunga bank yang berlaku, yakni sekitar 14 persen per tahun. Selama ini Kabupaten Kepulauan Meranti memasok hampir 70 persen bahan baku kelapa bulat ke industri hilir berbahan dasar kelapa di Malaysia. Dengan demikian selama itu pula nilai tambah yang bisa didapatkan daerah ini masih menjadi keuntungan untuk Malaysia.

#### **a. Perencanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan di Perbatasan Provinsi Riau.**

Sebagai Kabupaten dalam Propinsi Riau yang berbatasan secara langsung dengan dua negara tetangga Malaysia dan Singapura, kabupaten kepulauan Meranti telah mempersiapkan diri dalam menyongsong perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Letak geografis kabupaten kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga tersebut, akan menjadikan kabupaten ini sebagai sasaran empuk bagi produk-produk negara luar. Untuk itu diperlukan upaya agar local dapat berdaya saing tinggi, sehingga juga dapat memanfaatkan pasar tunggal MEA. Peningkatan pembangunan infrastruktur serta diperlukan kreativitas dan produktivitas yang handal agar produk yang dihasilkan memiliki daya tarik dan saing tinggi.

Perdagangan bebas ASEAN bisa menjadi tantangan atau peluang bagi masyarakat. Menjadi tantangan karena harus bersaing secara bebas dengan Negara-negara ASEAN, sedangkan peluang masyarakat bisa mempromosikan produk-produk atau hasil kreativitasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga secara bebas sampai keluar negeri, yakni Negara-negara anggota sesama ASEAN.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: penyiapan infrastruktur, mengundang investor luar negeri, terutama dari negara-negara sesama anggota ASEAN, pengembangan produk unggulan lokal.

##### **a. Penyiapan Infrastruktur dan Suprastruktur.**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Kabupaten Meranti akan memprioritaskan membangun Jembatan jelang pasar bebas untuk memudahkan masyarakat untuk membangun ekonomi dan mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Dengan pembangunan infrastruktur jembatan, semua pihak baik masyarakat Kepulauan Meranti mampu bersaing dan mempersiapkan diri untuk berkompetisi agar tidak kalah saing dengan Negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN. Namun kenyataannya pembangunan jembatan yang dimaksud sampai pada saat penelitian dilakukan belum lagi terealisasi.

Disamping itu untuk menunjang pembangunan Infrastruktur yang telah ada terutama agar kualitas hidup dan kesejahteraan manusia tetap dipertahankan pemerintah harus menyediakan perangkat teknologi dan sumberdaya handal, terutama dengan bekerjasama dengan universitas-universitas di provinsi dan kabupaten provinsi Riau.

#### b. Mengundang Investor Luar Negeri

Menurut pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang semakin meningkat mengundang minat investor negeri jiran Malaysia untuk berinvestasi. Pemerintah telah mencoba mengundang investor dari Malaysia lewat Menteri dalam negeri Malaysia. Pemerintah mengharapkan investasi modal dari Malaysia dapat segera masuk dan menggarap beberapa potensi serta peluang yang belum banyak tergarap di Kepulauan Meranti. Para



investor Malaysia bisa menggarap sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan, infrastruktur dan bandar udara. Menurut pemerintah Meranti, selama ini sudah banyak penanaman modal asing masuk ke Kepulauan Meranti yang menggarap sektor-sektor unggulan dan semuanya memberikan keuntungan. Selain memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi daerah, tenaga kerja lokal bisa terserap dan efek ekonomi dari investasi tersebut akan memberikan dampak yang luas dan baik bagi Kepulauan Meranti. Namun sampai saat ini keadaan inipun belum jelas, dimana hal ini juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah pusat.

### c. Pengembangan Produk Unggulan Lokal

Pemerintah akan mengangkat produk khas daerah yang berkualitas dan terstandarisasi sehingga daerah mendapatkan efek positif di era pasar bebas kawasan ASEAN tersebut. Selama ini inovasi produksi produk unggulan lokal masih sebatas dalam bentuk bahan setengah jadi. Produk olahan sagu kebanyakan hanya dalam bentuk tepung atau bubuk untuk selanjutnya diproses menjadi produk akhir di daerah-daerah lain. Hasil panen kelapa sebagian besar dijual dalam bentuk buah bulat, dimana selama ini kelapa bulat tersebut sudah sejak lama memenuhi bahan baku produk hilir di Malaysia, sehingga nilai tambahnya diperoleh oleh Malaysia. Untuk itu perlu segera dikembangkan industri pengolahan produk akhir di wilayah ini khususnya yang berbahan dasar komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti sagu, kopi, jagung, kelapa dan hasil laut.

Dengan produksi sagu Kepulauan Meranti mencapai 276 ribu Ton pertahun, selain untuk memenuhi kebutuhan Sagu Nasional, Sagu asal Kepulauan Meranti juga diekspor ke luar negeri. Sagu Meranti bukan saja ke Asia Tenggara, tetapi juga ke Asia Barat dan Timur.

Untuk itu, kebijakan Pemkab Meranti dalam memanfaatkan dan menumbuhkan potensi tradisionalnya, harus mengarah pada upaya untuk mengembalikan kedaulatan masyarakatnya terhadap pengelolaan potensi lokal. Kalau ini mampu dilakukan, Meranti ke depan akan benar-benar tumbuh menjadi kawasan niaga yang benar-benar dengan segala potensi keunggulannya. Kebijakan yang mampu melindungi hak-hak masyarakat terhadap penguasaan lahan sebagai



basis ekonomi. Ini akan menjadi satu hal yang sangat penting, ketika Meranti dengan segala keunggulannya memasuki era sebagai kawasan niaga.

### PENUTUP

1. Sektor unggulan daerah terdepan yang bersinergi dalam menghadapi adanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah: sector pertanian dalam pengertian luas; sector perdagangan dan sector industri pengolahan. Sedang potensi wilayah dan sektor unggulan daerah hinterland yang bersinergi dalam menghadapi peluang dan tantangan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah: sector pertanian dalam pengertian luas dan sector industry pengolahan;
2. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terdepan dan hinterland yang bersinergi dalam menghadapi peluang dan tantang adanya pasar bebas masyarakat Eonomi ASEAN (MEA) masih sangat kurang.

### KEPUSTAKAAN

- disamita, R. 2008. Pengembangan Wilayah, Konsep dan Teori. Graha Ilmu, Jakarta
- Amaliyah, 2008). "Impact of Implementation Agreement on Agriculture on Food Security Indonesia: The Case of Soybean Import" (Skripsi Sarjana University Press.).
- Armada, Z. 2014. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Artikel online
- Association of Southeast Asian Nations (2008). Asean Economic Community Blueprint. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Badan Peengelola Perbatasan Daerah Propinsi Riau. 2015. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemetaan Potensi Wilayah Kawasan Perbatasan (Kabupaten Kepulauan Meranti).
- Baswir, (2009) The dangers of Neoliberalism (The Dangers of Neoliberalism) (Yogyakarta: Pustaka Student.
- Chrastaller, W. 1966. Central Places in South Germany, terjemahan Baskin, W.W. Englewoods Cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc.





- Fadali, E and R.Hs Thomas. 2006. Estimated Economic Impacts of the Cattle Ranching and Farming Sector on the Elko County Economy. Technical Report Used 2005/06-26. University of Nevada, Nevada.
- Hernandez, R. A. (2014, Januari). YEARENDER: Asean Economic Community to play major role in SEA food security.
- Hirschman, A.O. 1958. The Strategy of Economic Development. Yale University. New Heaven.
- Hood. 1998. Economic Analysis A Location Quotient, Primer, Principle Sun Region Associates.
- Hammond, Charles Whyone. 1985; Element of Human Geography. London: George Allen & Unwin
- Keban, Jeremiah, T. 1995; Regional Development (Hand Out). Yogyakarta: Fak. Postgraduate UGM.
- Kuklinski, A. (ed). 1972. Growth Poles and Growth Centres in Regional Planning. The Hague. Mouton.
- Myrdal, G. 1976. United Nations Rich and Poor, Paul Sitoang. Gramedia translation. Jakarta.
- Murtomo, 1988; Regional and Rural Development Planning Series. Yogyakarta: GadjahMada University.
- Perroux, F. 1964. Economic Space: Theory and Applications, dalam Friedmann J. And Alonso, W (ed). Regional Development and Planning: A Reader, Cambridge, Massachusetts, The M.I.T. Press
- Plummer, M, G., & Yue, C, S. (2009). Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Richardson, H.W. 1972. Regional Economics: Location Theory, Urban Structure and Regional Change. Weidenfeld and Nicolson. London.
- Santoso, W. et.al (2008). Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional. Jakarta: Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
- Shin, Kwanho and Yunjong Wang, (2004). Trade Integration and Business Cycle Synchronization in East Asia. Asian Economic Papers

